

**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2024**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAGETAN



**SUCIPPO, SH. M.Hum**

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19660714 199403 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	6
D. Sumber Daya Organisasi	7
1. Kepegawaian	7
2. Sarana dan Prasarana	11
3. Anggaran	12
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	17
F. Landasan Hukum	18
G. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026	22
1. Visi dan Misi Tahun 2024 - 2026	
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024 - 2026	
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024 - 2026	
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026	
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	31
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	46
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	46
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	49
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen	

perencanaan strategis organisasi	49
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	51
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	51
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	53
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	59
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	63
D. Inovasi Tahun 2024	68
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Simpulan	
B. Rencana Aksi Tahun n+1	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

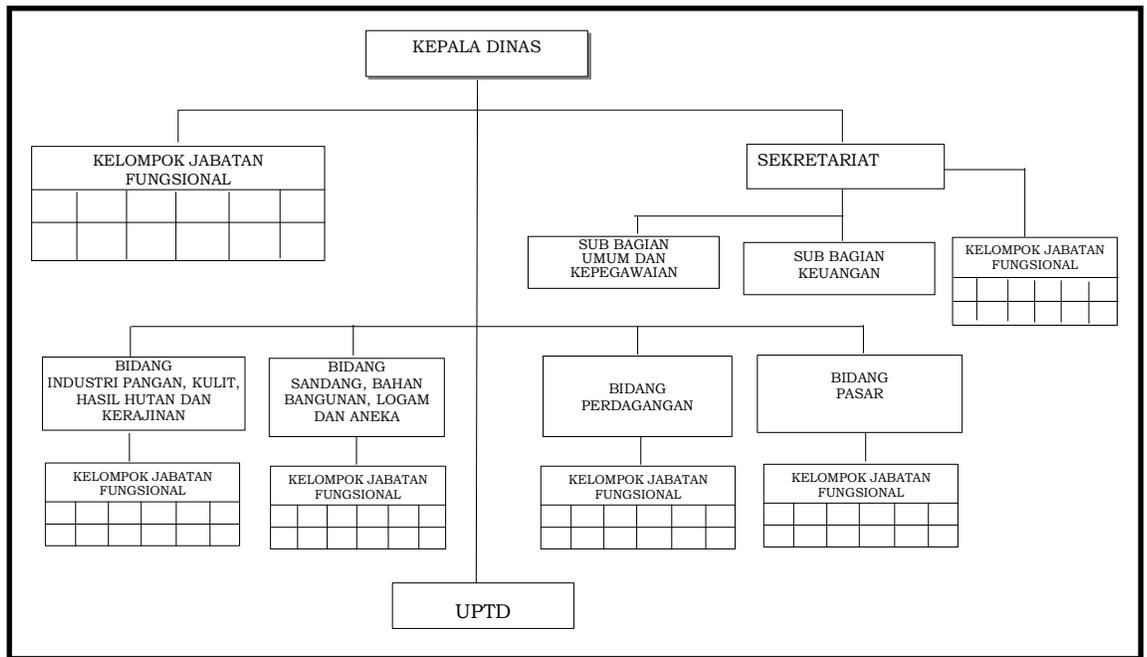
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terdiri atas:

- a. Sekretariat, yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pasar, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

**Gambar 1.1.**  
**Susunan Organisasi**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Magetan**



### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah..

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pasar ;
- b. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pasar;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan di Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka. Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pasar;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi IKM dan UKM;
- h. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan serta pengembangan usaha Industri, Perdagangan dan Pasar; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **D. SUMBER DAYA ORGANISASI**

### **1. Kepegawaian**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 59 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (Orang)	Realisasi (Orang)	Kekurangan/Kelebihan (Orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
5	Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan	1	1	0
6	Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka	1	1	0
7	Kepala Bidang Perdagangan	1	1	0
8	Kepala Bidang Pasar	1	1	0
9	Kepala UPTD Metrologi Legal	1	1	0
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	1	1	0
11	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	-1
12	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
14	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
15	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
16	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
17	Operator Layanan Operasional	3	3	0
18	Pengelola Umum Operasional	1	1	0
19	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
20	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
21	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
22	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
23	Penelaah Teknis Kebijakan	4	1	-3
24	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1	1	0
25	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	-3

26	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
27	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	2	0
28	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
29	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
30	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
31	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	1	1	0
32	Penelaah Teknis Kebijakan	8	8	0
33	Pengolah Data Dan Informasi	9	0	-9
34	Pengelola Layanan Operasional	5	0	-5
35	Pengadministrasi Perkantoran	19	16	-3
36	Pengadministrasi Perkantoran	4	4	0
37	Operator Layanan Operasional	130	0	-130
38	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	1	1	0
39	JF Penera Ahli Pertama	3	3	0
40	JF Penera Ahli Muda	2	0	-2
41	JF Penera Penyelia	1	0	-1
42	JF Penera Mahir	2	0	-2
43	JF Penera Terampil	2	0	-2
44	Pengelola Layanan Operasional	1	0	-1
45	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
46	Operator Layanan Operasional	1	0	-1
47	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama	7	0	-7
48	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	2	1	-1
49	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan	1	1	0
50	JF Perencana Ahli Madya	1	0	-1
51	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	2	0	-2
52	JF Analis Perdagangan Ahli Madya	1	0	-1
53	JF Arsiparis Terampil	2	0	-2
54	JF Pranata Komputer Pelaksana	2	0	-2
55	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	-1
56	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	1	0	-1
57	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	5	0	-5
58	JF Pengamat Tera Terampil	2	0	-2

59	JF Pengamat Tera Mahir	2	0	-2
60	JF Pengamat Tera Penyelia	2	0	-2
61	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	1	0	-1
62	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	1	0	-1
63	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya	1	0	-1
64	JF Penera Ahli Madya	1	0	-1
	Jumlah	271	61	210

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.  
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	-
4	Pembina/IV-a	5
5	Penata Tk.I/III-d	10
6	Penata/III-c	4
7	Penata Muda Tk.I/III-b	9
8	Penata Muda/III-a	19
9	Pengatur/II-d	3
10	Pengatur/II-c	5
11	Pengatur/II-b	1
12	Pengatur/IIa	2
	Jumlah	59

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	6
3	Strata 1/Sederajad	27
4	Diploma	2
5	SMA/Sederajad	20
6	SMP/Sederajad	4
7	SD/Sederajad	-
	Jumlah	59

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	41
2	Perempuan	18
	Jumlah	59

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
per 31 Desember 2024  
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	21.640.286.256			21.640.286.256
2	Peralatan dan Mesin	8.249.412.070	154.942.200		8.404.354.270
3	Gedung dan Bangunan	111.287.139.906	3.629.703.042		114.916.842.948
4	Aset Tetap Lainnya	6.660.000			6.660.000
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	306.780.710			306.780.710
	Jumlah	141.490.278.942	3.784.645.242		145.274.924.184

### 3. Anggaran (*pergeseran terakhir*)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 20.090.017.354,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024  
(Sebelum Penyusutan)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
	<b>Total Anggaran</b>			<b>20,090,017,354</b>
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,548,500,000
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	141,000,000
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	75	%	15,000,000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	laporan	7,500,000
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75	%	11,000,000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	11,000,000
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75	%	15,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1	Dokumen	7,500,000
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	75	%	15,000,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	7,500,000
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	77,500,000
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	37,500,000
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	40,000,000
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	50	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen	7,500,000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	5,595,000,000

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	5,070,000,000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	4,320,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21	Unit	750,000,000
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	85	%	525,000,000
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen	525,000,000
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	267,500,000
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	75	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	7,500,000
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	205,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	45,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52	Laporan	40,000,000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	120,000,000
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	5	Laporan	55,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3	Laporan	55,000,000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15	Pelaku Usaha	60,000,000
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pelaku Usaha	35,000,000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	100	%	180,000,000
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	100	%	180,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000	Unit	115,000,000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	Orang	65,000,000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	UMKM	230,000,000

Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	40,000,000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,980,000,000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	2,780,000,000
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	2,780,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dokumen	100,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5	Dokumen	1,382,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dokumen	1,228,000,000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	40,000,000
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	4	Dokumen	30,000,000
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	40,000,000
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	35,000,000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	75,000,000
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	50,000,000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,78	Indeks	10,561,517,354

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	Dokumen	56,425,700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	25,299,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	31,126,200
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	%	6,533,017,354
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/bulan	6,527,017,354
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	6,000,000
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26	Dokumen	252,964,650
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	233,738,250
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	Dokumen	19,226,400
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	64	orang	39,824,250
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	17,824,250
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	22,000,000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97	Paket	461,134,900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	29,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	125,502,650
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	17,132,250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	40,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	55,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	174,000,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Laporan	3,033,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	240,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	30,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,763,500,000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7	Unit	184,650,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	55,560,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	60,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	69,090,500

## E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Era revolusi industri ke-4 (Industry 4.0) akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot semua serba *Internet of/for Things*, dan

*masih sangat kecilnya pengetahuan dan kesiapan industry kita berinovasi menyesuaikan dengan era industri 4.0*

2. Perlunya peningkatan SDM ( pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek ) bagi pengusaha IKM, UKM dan IRT sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi/dalam mengelola usahanya.
3. Masih perlunya Pengembangan Industri kecil sebagai penunjang Pariwisata baik dari kemasan maupun dari factor perijinan produk, yang dapat dikembangkan untuk oleh – oleh khas.
4. Masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industry terutama industry kecil di kabupaten magetan mengakibatkan kurang bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
5. Pembangunan sentra – sentra ekonomi/penumbuhan usaha baru agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya.
6. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi pemasalahan ketika akan memberi bantuan
7. Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain-lain)
8. Masih perlunya Penataan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Industri kecil dan menengah utamanya industri unggulan yang dimiliki Kab. Magetan yaitu Industri kecil pengolahan kulit menjadi industri unggulan dan memiliki keterkaitan proses hulu hilir industri, dimana Industri kecil penyamakan kulit sebagai industri hulunya dan industri kecil kerajinan kulit sebagai industri hilirnya.
9. Ipal mengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit belum memadai sehingga sangat mencemari dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup ( Ancaman pencemaran lingkungan dari industri kulit )
10. Pemilihan lokasi realokasi LIK 2 yang masih terkendala pemilihan lokasi dan pembebasan lahan.
11. Fasilitasi kepada IKM dan UKM tentang adanya pameran - pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan di Kab. Magetan maupun diluar Kab. Magetan
12. Pendampingan IKM untuk dapat masuk ke pasar digital.

13. Data base Pedagang Kaki Lima (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain lain)
14. Penataan pedagang PK5 di tempat sesuai peruntukannya.
15. Masih diperlukannya tata kelola pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern untuk menarik minat konsumen datang belanja di pasar tradisonal.

Perumusan Isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024 -2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 , Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Pedagang di pasar daerah;
2. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
3. Pendampingan IKM unuk legalitas usaha;
4. Penyusunan draf RPIK

## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati nomor: 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 Tanggal 1 Februari 2024

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

### **BAB II          PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III        AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja
  - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024 - 2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2024 - 2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
dengan Visi dan Misi Bupati Magetan  
Tahun 2024 - 2026

Visi RPJPD: Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat
Misi ke-2 RPJPD: . Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah
Tujuan ke-1 RPD: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>
Sasaran ke-1 RPD: .Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Kabupaten Magetan</li> </ul>
Strategi RPD:Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
Arah Kebijakan RPD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas dan efisiensi akses permodalan wirausahawan baru dan kelompok usaha perempuan</li> <li>2. Integrasi sektor dan produk unggulan daerah terhadap pengembangan sistem kepariwisataan Kabupaten Magetan</li> <li>3. Pengembangan kelompok usaha mikro dan kelompok industri melalui sistem pendampingan baik oleh praktisi maupun kerjasama perguruan tinggi</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submsttion) dalam penguatan pelayanan perizinan</li> <li>5. Meningkatkan branding dan pemasaran produk dan potensi Kabupaten Magetan melalui pelaksanaan dan keikut sertaan event – event bertaraf nasional maupun internasional</li> <li>6. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka efektifitas pengelolaan fdestinasi dan pengembangan potensi usaha pariwisata daerah serta pemanfaatan aset daerah lainnya</li> <li>7. Pembangunan infrastruktur pengembangan rantai nilai pariwisata daerah</li> </ol>
<p>Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li> <li>2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>5. Program Pengembangan Eksport</li> <li>6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<p>Tujuan OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator PDRB Sektor Perdagangan</li> <li>• Indikator PDRB Sektor Industri</li> </ul> </li> </ol>
<p>Sasaran OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan</li> <li>2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah</li> <li>3. Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikator Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026**

## 1. Visi dan Misi Tahun 2024 - 2026

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025, yaitu :

**Visi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025**  
**Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan**  
**Bermartabat**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan Keadilan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-2** RPJPD.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Tujuan yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yaitu Tujuan RPJPD ke- 1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan serta mendukung Sasaran RPJPD ke-1 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan dengan Strategi Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi dan Arah Kebijakan yang sesuai RPJPD.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024 - 2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 1 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	-	Sasaran	-	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah			1.1	PDRB sektor perdagangan	2,527,602,65 Juta Rupiah	2,637,306,77 Juta Rupiah	2,747,010,89 Juta Rupiah
				1.2	PDRB sector Industri	919.090,12 Juta Rupiah	962.770,45 Juta Rupiah	1.006.450,78Juta Rupiah

	1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	1.1.1	Persestase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,15%	7,16%	7,17%
	2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,200 %	0,201 %	0,202 %
	3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.1.1	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,78	84,79	84,80
			3.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.75	79,90	80

*Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2024-2026*

### **b. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Tahun 2024 – 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat  
MISI ke-2 : Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
				1.1.4	Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.1.4.1	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan

	1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
					2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
					2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
	1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.1.1	Meminimalkan kesenjangan antara tingkat layanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan harapan dan keinginan stakeholder	3.1.1.1	Meningkatkan Kualitas SDM
					3.1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

*Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2024-2026*

### **c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
 tahun 2024 – 2026

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<i>Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah</i>				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	1. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	$\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dan Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 - 2026*

## 5. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024:

**Tabel 2.3**

### **Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024**

#### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7.15%
		Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	0.200%
		Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Skor	84,78
			Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	79,75

*Sumber: Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024*

## 6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kegiatan Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7.15 %
2.	Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil	%	0.2 %
3.	Meningkatkan Indeks	Indeks Kepuasan	Indeks	79,62

	Pelayanan Publik	Masyarakat Perindustrian dan Perdagangan	Urusan dan		
--	------------------	--	------------	--	--

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan:

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volumen	
	<b>Total Anggaran</b>			<b>17,786,277,011</b>
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5,928,500,000
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	141,000,000
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	75	%	15,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	laporan	7,500,000
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75	%	11,000,000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	11,000,000
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75	%	15,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1	Dokumen	7,500,000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1	Dokumen	7,500,000
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	75	%	15,000,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	7,500,000
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	77,500,000
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	37,500,000
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	40,000,000
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	50	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen	7,500,000
<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	4,975,000,000
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	4,450,000,000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	3,700,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21	Unit	750,000,000
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	85	%	525,000,000
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen	525,000,000
<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	267,500,000
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	75	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	7,500,000
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	205,000,000

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	45,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52	Laporan	40,000,000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	120,000,000
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	5	Laporan	55,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3	Laporan	55,000,000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15	Pelaku Usaha	60,000,000
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pelaku Usaha	35,000,000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang ditera	100	%	180,000,000
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTPP yang ditera	100	%	180,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000	Unit	115,000,000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	Orang	65,000,000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	UMKM	230,000,000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	40,000,000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,790,000,000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	1,590,000,000
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	1,590,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dokumen	100,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5	Dokumen	720,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dokumen	700,000,000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	40,000,000

Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	4	Dokumen	30,000,000
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	40,000,000
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	35,000,000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	75,000,000
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	50,000,000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,78	Indeks	10,067,777,011
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	Dokumen	80,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30,000,000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	%	6,039,277,011
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/bulan	6,033,277,011
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	6,000,000
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26	Dokumen	282,000,000
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	260,000,000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	Dokumen	22,000,000
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	64	orang	47,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	25,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	22,000,000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97	Paket	416,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	29,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	104,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	17,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	40,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	55,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	150,000,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Laporan	3,033,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	240,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	30,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,763,500,000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7	Unit	170,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	60,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60,000,000

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi

anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7.15 %
2.	Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	0.200 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Skor	84,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	79,75

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2024*

Perubahan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volumen	
<b>Total Anggaran</b>				<b>20,090,017,354</b>
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,548,500,000
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	141,000,000
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	75	%	15,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	laporan	7,500,000
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75	%	11,000,000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	11,000,000
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75	%	15,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1	Dokumen	7,500,000
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	75	%	15,000,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	7,500,000
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	7,500,000

3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	77,500,000
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	37,500,000
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	40,000,000
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	50	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen	7,500,000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	5,595,000,000
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	85	%	5,070,000,000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	4,320,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21	Unit	750,000,000
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	85	%	525,000,000
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen	525,000,000
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	267,500,000
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	75	%	7,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	7,500,000
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	205,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	45,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52	Laporan	40,000,000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	120,000,000
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	5	Laporan	55,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3	Laporan	55,000,000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	90	%	95,000,000
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15	Pelaku Usaha	60,000,000

Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6	Pelaku Usaha	35,000,000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	100	%	180,000,000
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	100	%	180,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000	Unit	115,000,000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	Orang	65,000,000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	80	%	270,000,000
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	UMKM	230,000,000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	40,000,000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,980,000,000
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	2,780,000,000
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	90	%	2,780,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dokumen	100,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5	Dokumen	1,382,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dokumen	1,228,000,000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	40,000,000
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	4	Dokumen	30,000,000
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	90	%	75,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	40,000,000
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	35,000,000

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	90	%	125,000,000
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	75,000,000
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	50,000,000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	77,78	Indeks	10,561,517,354
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	14	Dokumen	56,425,700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	25,299,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	31,126,200
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	%	6,533,017,354
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/bulan	6,527,017,354
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	6,000,000
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26	Dokumen	252,964,650
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	233,738,250
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	Dokumen	19,226,400
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	64	orang	39,824,250
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	17,824,250
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	22,000,000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97	Paket	461,134,900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	29,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	125,502,650
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	17,132,250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	40,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	55,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	174,000,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Laporan	3,033,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	240,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	30,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,763,500,000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7	Unit	184,650,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	55,560,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	60,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	69,090,500

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan	Cukup Berhasil

		kurang dari tujuh puluh lima persen	
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024.

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.15	7.15	100	Berhasil	
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.200	0.200	100	Berhasil	

Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.78	84.78	100	Berhasil	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79.75	79.50	99,69	Berhasil	

Uraian penjelasan tabel:

(capaian kinerja dan gambaran dukungan data capaian kinerja setiap IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase Pertumbuhan usaha perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari rumus dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } n - (n - 1)}{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } (n - 1)} \times 100 \\
 &= \frac{8012 - 7476}{7476} \times 100\% \\
 &= \frac{536}{7476} \times 100\% \\
 &= 7,15
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja prosentase pertumbuhan usaha perdagangan di dukung oleh Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program pengembangan ekspor. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2024 sudah mencapai target yaitu hanya sebesar 7,15, dengan adanya program belanja via e-katalog dan beralihnya cara beli masyarakat melalui digital marketing secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran pengusaha perdagangan untuk memproses legalitas usahanya. Selain pendampingan strategi yang kita ambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dengan pelatihan Digital Marketing, diberikan bantuan peralatan sarana perdagangan serta dilakukan pendampingan agar meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan bertransaksi digital. Proses

rehabilitasi pasar daerah juga terus dilakukan agar pembeli dan pedagang merasa nyaman, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase Pertumbuhan industri kecil. Hal ini dapat dilihat dari rumus dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah industri Th } n - (n - 1)}{\text{Jumlah industri Th } (n - 1)} \times 100 \\ &= \frac{13520 - 13493}{13493} \times 100\% \\ &= \frac{27}{13493} \times 100\% \\ &= 0,200 \end{aligned}$$

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) , Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan IKM di Kabupaten Magetan. Dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Pertumbuhan Industri Kecil untuk tahun 2024 sudah mencapai target, adapun strategi yang dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan industri tersebut adalah mengadakan kegiatan pelatihan – pelatihan bagi IKM untuk menambah wawasan dan nilai jual produk, Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi IKM untuk menunjang proses produksi, memberikan pelatihan dan pendampingan digital marketing salah satunya pendampingan pendaftaran e-katalog dan pendaftaran SIINas,

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

**Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Realis asi	%
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.11	3.04	42,75	7.15	7.15	100	7.15	7.15	100
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.19	0.07	36,84	0.20 0	0.20 0	100	0.2	0.2	100
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,7 5	84.8 5	100,11	84.7 6	84.7 8	100,02	84.7 8	84.78	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	78,5 0	81,4 1	103,70	75,0 0	72,6 2	96,82	79.7 5	79.50	99,69

**3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.15	7.17	99.72
2	Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.200	0.202	99.01
3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.78	84.80	99.98
		Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79.50	80.00	99.38

Uraian penjelasan tabel (uraikan apakah capaian kinerja tahun 2024 sudah mencapai target akhir Renstra dan jika belum tercapai berapa poin/% lagi yang harus dicapai untuk melebihi target akhir Renstra):

Upaya maksimal akan dilakukan untuk pencapaian target Renstra di tahun 2026.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain ( Bila Ada )**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	NIHIL				

Uraian penjelasan tabel:

NIHIL

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

**Tabel 3.6**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.15	7.15	100	Berhasil Sesuai Target
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.200	0.200	100	Berhasil Sesuai Target
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggara	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.78	84.78	100	Berhasil Sesuai Target

aan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79.75	79.50	99.69	Berhasil Tetapi Belum Sesuai Target dikarenakan jumlah responden di e-SKM yang masih sedikit
--	---	-------	-------	-------	--

Uraian penjelasan tabel (uraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja tahun 2024,):

Tingkat partisipasi responden di e-SKM yang sedikit, sehingga mempengaruhi nilai hasil surveynya.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	Pendataan jumlah usaha perdagangan	Melakukan pendataan jumlah usaha perdagangan, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pendataan jumlah Industri Kecil Menengah	Melakukan jumlah Industri Kecil Menengah dan pendampingan legalitas usaha dan SIINas
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tertib Administrasi	Melakukan penertiban administrasi meliputi kepegawaian, keuangan, maupun pelayanan

daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah responden yang sedikit	Pemasangan scan barcode agar memudahkan responden pengguna layanan Disperindag mengisi form survey
---	---	-------------------------------	--

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran	Menunjang /Tidak Menunjang
						17,110,017,354	Menunjang
			3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	100	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100	6,548,500,000	Menunjang
			3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	100	141,000,000	Menunjang
			3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	100	15,000,000	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	7,500,000	Menunjang
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	100	7,500,000	Menunjang
			3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	100	11,000,000	Menunjang
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100	11,000,000	Menunjang

3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	100	15,000,000	Menunjang
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	100	7,500,000	Menunjang
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	100	7,500,000	Menunjang
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	100	15,000,000	Menunjang
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	7,500,000	Menunjang
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	7,500,000	Menunjang
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	100	77,500,000	Menunjang
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	100	37,500,000	Menunjang
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	100	40,000,000	Menunjang
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	100	7,500,000	Menunjang
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	100	7,500,000	Menunjang
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	100	5,595,000,000	Menunjang
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	100	5,070,000,000	Menunjang
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100	4,320,000,000	Menunjang
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	750,000,000	Menunjang

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	100	525,000,000	Menunjang
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	525,000,000	Menunjang
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	267,500,000	Menunjang
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	100	7,500,000	Menunjang
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100	7,500,000	Menunjang
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	205,000,000	Menunjang
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	45,000,000	Menunjang
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100	40,000,000	Menunjang
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	120,000,000	Menunjang
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	100	55,000,000	Menunjang
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	100	55,000,000	Menunjang
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	100	95,000,000	Menunjang
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	100	95,000,000	Menunjang
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100	60,000,000	Menunjang
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	100	35,000,000	Menunjang
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	100	180,000,000	Menunjang
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	100	180,000,000	Menunjang
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	49	115,000,000	Menunjang
Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100	65,000,000	Menunjang

			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	100	270,000,000	Menunjang
			3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	100	270,000,000	Menunjang
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100	230,000,000	Menunjang
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100	40,000,000	Menunjang
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	100	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	100	2,780,000,000	Menunjang
			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	100	2,780,000,000	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100	100,000,000	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100	1,382,000,000	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100	1,228,000,000	Menunjang
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100	40,000,000	Menunjang
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	100	30,000,000	Menunjang
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	100	75,000,000	Menunjang
			3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	100	75,000,000	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	100	40,000,000	Menunjang

			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100	35,000,000	Menunjang
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	100	125,000,000	Menunjang
			3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	100	125,000,000	Menunjang
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100	75,000,000	Menunjang
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	100	50,000,000	Menunjang
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	100	10,561,517,354	Menunjang
		99,69	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100	56,425,700	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	25,299,500	Menunjang
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	31,126,200	Menunjang
			X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	6,533,017,354	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	6,527,017,354	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	6,000,000	Menunjang
			X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	252,964,650	Menunjang
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100	233,738,250	Menunjang
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	19,226,400	Menunjang
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	100	39,824,250	Menunjang			

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	17,824,250	Menunjang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	22,000,000	Menunjang
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	461,134,900	Menunjang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	29,500,000	Menunjang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	125,502,650	Menunjang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	17,132,250	Menunjang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	40,000,000	Menunjang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	20,000,000	Menunjang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	55,000,000	Menunjang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	174,000,000	Menunjang
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3,033,500,000	Menunjang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	240,000,000	Menunjang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	30,000,000	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	2,763,500,000	Menunjang
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	184,650,500	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	55,560,000	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	60,000,000	Menunjang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	69,090,500	Menunjang

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	<b>Total Anggaran</b>	<b>20,090,017,354</b>	<b>19,070,852,319</b>	<b>95</b>
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		6,548,500,000	6,335,891,058	97
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		141,000,000	102,747,550	73
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		15,000,000	10,037,950	67
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bidang Perdagangan	7,500,000	4,239,000	57
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Bidang Perdagangan	7,500,000	5,798,950	77
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		11,000,000	5,242,500	48
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Bidang Perdagangan	11,000,000	5,242,500	48
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		15,000,000	11,051,750	74
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Bidang Perdagangan	7,500,000	5,087,250	68
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Bidang Perdagangan	7,500,000	5,964,500	80
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		15,000,000	5,667,600	38
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Bidang Perdagangan	7,500,000	4,207,400	56
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Bidang Perdagangan	7,500,000	1,460,200	19
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		77,500,000	65,230,500	84
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Bidang Perdagangan	37,500,000	34,347,000	92

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Bidang Perdagangan	40,000,000	30,883,500	77
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		7,500,000	5,517,250	74
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Bidang Perdagangan	7,500,000	5,517,250	74
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		5,595,000,000	5,530,151,234	99
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5,070,000,000	5,018,299,017	99
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar	4,320,000,000	4,273,528,642	99
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar	750,000,000	744,770,375	99
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		525,000,000	511,852,217	97
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan	525,000,000	511,852,217	97
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		267,500,000	219,080,124	82
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		7,500,000	5,823,750	78
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Bidang Perdagangan	7,500,000	5,823,750	78
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		205,000,000	176,436,874	86
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan	45,000,000	31,215,458	69
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bidang Perdagangan	40,000,000	32,391,500	81
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan	120,000,000	112,829,916	94
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55,000,000	36,819,500	67
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Bidang Perdagangan	55,000,000	36,819,500	67
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		95,000,000	81,824,000	86
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		95,000,000	81,824,000	86
Pameran Dagang Lokal	Bidang Perdagangan	60,000,000	48,079,000	80
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Bidang Perdagangan	35,000,000	33,745,000	96
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		180,000,000	179,940,000	100
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		180,000,000	179,940,000	100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	UPT Metrologi	115,000,000	114,990,000	100
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	UPT Metrologi	65,000,000	64,950,000	100
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		270,000,000	222,148,150	82

3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		270,000,000	222,148,150	82
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan	230,000,000	185,765,150	81
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan	40,000,000	36,383,000	91
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		<b>2,980,000,000</b>	<b>2,748,237,712</b>	<b>92</b>
<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>2,780,000,000</b>	<b>2,562,347,462</b>	<b>92</b>
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2,780,000,000	2,562,347,462	92
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bidang Industri Non Agro	100,000,000	98,057,700	98
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bidang Industri Agro	1,382,000,000	1,186,704,936	86
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bidang Industri Non Agro	1,228,000,000	1,208,846,717	98
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bidang Industri Agro	40,000,000	39,056,209	98
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Bidang Industri Agro	30,000,000	29,681,900	99
<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>75,000,000</b>	<b>69,670,500</b>	<b>93</b>
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		75,000,000	69,670,500	93
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Industri Non Agro	40,000,000	39,018,500	98
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Bidang Industri Agro	35,000,000	30,652,000	88
<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>125,000,000</b>	<b>116,219,750</b>	<b>93</b>
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		125,000,000	116,219,750	93
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Bidang Industri Agro	75,000,000	72,519,750	97
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Bidang Industri Non Agro	50,000,000	43,700,000	87
<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>10,561,517,354</b>	<b>9,986,723,549</b>	<b>95</b>
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56,425,700	52,817,050	94
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	25,299,500	24,059,750	95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	31,126,200	28,757,300	92
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,533,017,354	6,313,161,289	97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	6,527,017,354	6,307,161,289	97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sekretariat	6,000,000	6,000,000	100

X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		252,964,650	214,644,750	85
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sekretariat	233,738,250	195,767,200	84
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sekretariat	19,226,400	18,877,550	98
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		39,824,250	30,433,250	76
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	17,824,250	15,079,800	85
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	22,000,000	15,353,450	70
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		461,134,900	452,587,872	98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	29,500,000	29,405,900	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	125,502,650	120,849,500	96
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat	17,132,250	16,740,400	98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	40,000,000	38,818,550	97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	20,000,000	19,611,550	98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	55,000,000	55,000,000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	174,000,000	172,161,972	99
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,033,500,000	2,748,097,308	91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	240,000,000	237,434,558	99
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	30,000,000	28,383,750	95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	2,763,500,000	2,482,279,000	90
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184,650,500	174,982,030	95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat	55,560,000	54,343,161	98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	60,000,000	52,038,469	87
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat	69,090,500	68,600,400	99

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER/UNIT PENGHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pelataran	110,000,000	114,140,000	103.76
2	Retribusi Kios	3,140,000,000	3,318,314,931	105.68
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1,000,000,000	1,112,800,000	111.28

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.15	7.15	100	6,548,500,000	6,335,891,058	96.75	9.9
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.200	0.200	100	2,780,000,000	2,562,347,462	92.17	9.9
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.78	84.78	100	10,561,517,354	9,986,723,549	94.56	9.9
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79.75	79.50	99,69				

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
				17,110,017,354	16,322,614,607	95.40	9.9
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,548,500,000	6,335,891,058	96.75	9.9
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	75 %	75 %	100	141,000,000	102,747,550	72.87	9.9
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	75 %	75 %	100	15,000,000	10,037,950	66.92	9.9
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	4,239,000	56.52	9.9

Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	1 laporan	100	7,500,000	5,798,950	77.32	9.9
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	75 %	75 %	100	11,000,000	5,242,500	47.66	9.9
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11,000,000	5,242,500	47.66	9.9
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	75 %	75 %	100	15,000,000	11,051,750	73.68	9.9
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	5,087,250	67.83	9.9
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	5,964,500	79.53	9.9
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	75 %	75 %	100	15,000,000	5,667,600	37.78	9.9
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	4,207,400	56.10	9.9
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	1,460,200	19.47	9.9
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75 %	75 %	100	77,500,000	65,230,500	84.17	9.9
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8 Laporan	8 Laporan	100	37,500,000	34,347,000	91.59	9.9
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8 Laporan	8 Laporan	100	40,000,000	30,883,500	77.21	9.9
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	50	50	100	7,500,000	5,517,250	73.56	9.9
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7,500,000	5,517,250	73.56	9.9
<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>100</b>	<b>5,595,000,000</b>	<b>5,530,151,234</b>	<b>98.84</b>	<b>9.9</b>
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	85 %	85 %	100	5,070,000,000	5,018,299,017	98.98	9.9
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	100	4,320,000,000	4,273,528,642	98.92	9.9
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Unit	21 Unit	100	750,000,000	744,770,375	99.30	9.9
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	85 %	85 %	100	525,000,000	511,852,217	97.50	9.9
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	525,000,000	511,852,217	97.50	9.9

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 %	100 %	100	267,500,000	219,080,124	81.90	9.9
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75 %	75 %	100	7,500,000	5,823,750	77.65	9.9
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	100	7,500,000	5,823,750	77.65	9.9
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100	205,000,000	176,436,874	86.07	9.9
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100	45,000,000	31,215,458	69.37	9.9
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52 Laporan	52 Laporan	100	40,000,000	32,391,500	80.98	9.9
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100	120,000,000	112,829,916	94.02	9.9
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	100	55,000,000	36,819,500	66.94	9.9
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3 Laporan	3 Laporan	100	55,000,000	36,819,500	66.94	9.9
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	90 %	90 %	100	95,000,000	81,824,000	86.13	9.9
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90 %	90 %	100	95,000,000	81,824,000	86.13	9.9
Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	100	60,000,000	48,079,000	80.13	9.9
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	100	35,000,000	33,745,000	96.41	9.9
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %	100 %	100	180,000,000	179,940,000	99.97	9.9
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	100 %	100	180,000,000	179,940,000	99.97	9.9
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20000 Unit	9827 Unit	49	115,000,000	114,990,000	99.99	9.9
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	500 Orang	500 Orang	100	65,000,000	64,950,000	99.92	9.9
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	80 %	80 %	100	270,000,000	222,148,150	82.28	9.9
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	80 %	80 %	100	270,000,000	222,148,150	82.28	9.9
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	30 UMKM	100	230,000,000	185,765,150	80.77	9.9
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	100	40,000,000	36,383,000	90.96	9.9
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	90 %	90 %	100	2,780,000,000	2,562,347,462	92.17	9.9
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	90 %	90 %	100	2,780,000,000	2,562,347,462	92.17	9.9

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100,000,000	98,057,700	98.06	9.9
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1,382,000,000	1,186,704,936	85.87	9.9
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1,228,000,000	1,208,846,717	98.44	9.9
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	40,000,000	39,056,209	97.64	9.9
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100	30,000,000	29,681,900	98.94	9.9
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	90 %	90 %	100	75,000,000	69,670,500	92.89	9.9
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	90 %	90 %	100	75,000,000	69,670,500	92.89	9.9
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	40,000,000	39,018,500	97.55	9.9
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	35,000,000	30,652,000	87.58	9.9
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	90 %	90 %	100	125,000,000	116,219,750	92.98	9.9
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	90 %	90 %	100	125,000,000	116,219,750	92.98	9.9
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	75,000,000	72,519,750	96.69	9.9
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	50,000,000	43,700,000	87.40	9.9
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.78	77.78	100	10,561,517,354	9,986,723,549	94.56	9.9
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100	56,425,700	52,817,050	93.60	9.9
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	25,299,500	24,059,750	95.10	9.9
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100	31,126,200	28,757,300	92.39	9.9
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	6,533,017,354	6,313,161,289	96.63	9.9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	59 Orang/bulan	92	6,527,017,354	6,307,161,289	96.63	9.9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	6,000,000	6,000,000	100.00	9.9
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	100	252,964,650	214,644,750	84.85	9.9

Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	233,738,250	195,767,200	83.75	9.9
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	100	19,226,400	18,877,550	98.19	9.9
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64 orang	64 orang	100	39,824,250	30,433,250	76.42	9.9
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	100	17,824,250	15,079,800	84.60	9.9
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	100	22,000,000	15,353,450	69.79	9.9
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 Paket	97 Paket	100	461,134,900	452,587,872	98.15	9.9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100	29,500,000	29,405,900	99.68	9.9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	100	125,502,650	120,849,500	96.29	9.9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	100	17,132,250	16,740,400	97.71	9.9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100	40,000,000	38,818,550	97.05	9.9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100	20,000,000	19,611,550	98.06	9.9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40 Dokumen	40 Dokumen	100	55,000,000	55,000,000	100.00	9.9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100	174,000,000	172,161,972	98.94	9.9
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	60 Laporan	100	3,033,500,000	2,748,097,308	90.59	9.9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	100	240,000,000	237,434,558	98.93	9.9
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	30,000,000	28,383,750	94.61	9.9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	2,763,500,000	2,482,279,000	89.82	9.9
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	7 Unit	100	184,650,500	174,982,030	94.76	9.9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	55,560,000	54,343,161	97.81	9.9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	100	60,000,000	52,038,469	86.73	9.9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	69,090,500	68,600,400	99.29	9.9

### Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?

Apabila berdasarkan PMK no.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{$$

$$(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})$$

Efisiensi total =

$$((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}$$

(Pagu Anggaran Output1 x Capaian Output1) + (Pagu Anggaran Output2 x Capaian Output2) + dst

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAK<sub>i</sub> : Pagu anggaran keluaran i
- RAK<sub>i</sub> : Realisasi anggaran keluaran i
- CK<sub>i</sub> : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	Capaian Keluaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\%$$

$$= 26\%$$

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

#### D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah “Pas Mesem” yaitu Pasar Sadar dan Melek Metrologi.

Pas Mesem atau Pasar Sadar dan Melek Metrologi adalah suatu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Magetan dalam meningkatkan citra pasar tradisional dengan cara membuat pos ukur ulang yang dapat digunakan oleh konsumen atau pengunjung pasar dalam menakar ulang barang belanjannya. Serta memberikan pelayanan tera atau tera

ulang dan reparasi terhadap UTTP yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pedagang, pengguna, dan pemilik UTTP serta pengelola pasar tentang pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan metrology untuk melindungi hak – hak konsumen. Pasar Tertib Ukur di Pasar Kabupaten Magetan diharapkan dapat melindungi konsumen dan mendorong persaingan bisnis yang sehat. Sehingga dapat terwujudnya pasar tradisional yang tertib dalam pengukuran



Gambar. 3.1 Foto Pos Ukur Di Pasar Daerah



Gambar 3.2 Timbangan Ukur Ulang

#### E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yaitu:

Mendapatkan penghargaan perlindungan konsumen 2023 kategori Daerah Tertib Ukur dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag RI. Sebagai tindak lanjut dari penghargaan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan melakukan Inovasi Pasar Mesem atau Pasar Sadar dan Melek Metrologi salah satunya dengan diadakannya pos ukur di Pasar Daerah.

Diharapkan dengan adanya Pasar Tertib Ukur di pasar Kabupaten Magetan mampu mewujudkan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan citra daerah daerah bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran, mendukung terwujudnya sistem metrologi legal nasional guna terciptanya perdaganganyang jujur, adil dan transparan, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar, satuan metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta membangun kepedulian masyarakat khususnya di Pasar Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Magetan.



Gambar 3.3 Penerimaan penghargaan perlindungan konsumen

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

#### **A. SIMPULAN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2020-2025 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu (1) tujuan, tiga (3) sasaran dengan menggunakan empat (4) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari empat (4) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

##### **Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan**

- Sasaran ke-1 terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak tiga koma lima belas (3,15) indikator kinerja telah mencapai target. Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;

- Sasaran ke-1 didukung oleh enam (6) Program yang terdiri dari 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh empat belas (14) Kegiatan terdiri dari empat belas (14) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)

### **Sasaran 2: Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah**

- Sasaran ke-2 terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak satu (1) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak nol koma dua nol nol (0,200) Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh tiga (3) Program yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh sembilan (9) Kegiatan terdiri dari sembilan (9) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100. % (kategori berhasil)

### **Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

- Sasaran ke-3 terdiri dari dua (2) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.85% (kategori berhasil);
- Sebanyak dua (2) indikator kinerja telah mencapai target yaitu sebanyak seratus (100) dan sembilan puluh sembilan koma enam Sembilan (99,69) Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh satu (1) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh tujuh (7) Kegiatan terdiri dari tujuh (7) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100. % (kategori berhasil)

Tabel 4.1  
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja % (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.15	7.15	100
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.200	0.200	100
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.78	84.78	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79.75	79.50	99.69
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>99.92</b>
				<b>BAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tiga (3) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99.92% dengan serapan anggaran sebesar Rp16.322.614.607,- dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 9,9%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun n-1 sebesar 0.01 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah belum tercapainya salah satu indikator kinerja sasaran.

Serapan anggaran tahun 2024 ini naik (turun) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,4 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah pagu anggaran pada tahun 2023 lebih banyak dari pagu anggaran tahun 2024.

## B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Tujuan Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah		
Sasaran 1. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	Meningkatkan Kualitas Pasar/Sarana Distribusi Perdagangan
		Tersedianya data harga real dan harga rata-rata per komoditas
		Terlaksananya Pengamanan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Ukur
		Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan promosi potensi ekspor daerah
Sasaran 2. Meningkatkan Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan bechmark bagi pelaku industri Agro dan Non Agro
		Hasil Produksi IKM Yang diujikan
		Terlaksananya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri
Sasaran 3. Meningkatkan akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan
		Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi pada Disperindag
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas layanan

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Sasaran 1. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	-	-	-	7.16	7.16

Sasaran 2. Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	-	-	-	0.201	0.201
Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitasnya dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	84.79	84.79
	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	79.90	79.90

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAGETAN

 **SUCIPTO, SH. M.Hum**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660714 199403 1 009